

seribu KK Tangsel Tergusur Tol

Sosialisasi bagi warga tergusur, baru dilaksanakan pada akhir Februari.

CIPUTAT — Sekitar 1.000 rumah atau kepala keluarga di sembilan kelurahan di Kecamatan Ciputat dan Pamulang, Tangerang Selatan, bakal terkena imbas pembuatan jalan Tol Cinere-Serpong. Masih banyak warga yang sama sekali belum pernah menerima penjelasan resmi terkait rencana pengusuran rumah mereka.

"Untuk jalur Tol Serpong-Cinere sementara yang terdata mencapai 998 warga," kata Kepala Bagian Pertanahan Kota Tangerang Selatan Heru Agus Santoso, Senin (18/2). Angka itu masih bisa bertambah karena banyak rumah belum bisa diidentifikasi karena ditempati orang lain atau pemiliknya tidak di tempat. Menurut Heru, identifikasi RT dan RW yang terkena jalur Tol Cinere-Serpong akan terus dilakukan.

Jalan tol ini akan menghubungkan Kecamatan Cinere di Depok dengan kawasan Bumi Serpong Damai di Tangerang Selatan. Tol ini akan tersambung ke jalan Tol BSD. Total ada sembilan kelurahan di Ciputat dan Pamulang yang wilayahnya dilintasi tol terkena gusur. Perincian awal calon korban pengusuran, untuk Kecamatan Ciputat terdiri atas 527 KK dengan perincian 63 KK di Kelurahan Jombang, Serua 273 KK, Serua Indah 130 KK, Cipayung 39 KK, dan 20 KK untuk Kelurahan Ciputat. Untuk Kecamatan Pamulang, ada 473 KK yang terkena gusur dengan perincian Kelurahan Pamulang Timur 58 KK, Pamulang Barat 28 KK, Bambu Apus 316 KK, dan Pondok Cabe Udik 71 KK.

Heru belum bisa memastikan berapa jiwa warga yang nantinya harus pindah rumah bila proyek ini berjalan, apalagi total jumlah rumah yang tergusur baru bisa dipastikan pada tahap sosialisasi pada akhir Februari. Dalam sosialisasi juga dijelaskan tahapan dan mekanisme serta nilai kompensasi yang akan diterima warga setelah kediamannya terkena pembobasan lahan. "Warga dan pemerintah bisa berdialog," kata Heru sambil menjamin belum ada pematokan untuk saat ini.

Mengenai warga yang menolak pengusuran, Heru menunjuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Bina Marga untuk mengurusnya. Kedua instansi itu yang memiliki kewenangan dalam perancangan jalurnya. Heru juga mengingatkan warga yang dipastikan terkena pengusuran agar mewas-

padai aksi makelar tanah. Warga diminta untuk tidak begitu saja menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) tanah dan rumahnya menyusul rencana pembangunan jalan Tol Serpong-Cinere. "Jangan menyerahkan AJB selain kepada satgas (satuan tugas) yang telah dibentuk, tunggu sosialisasi."

Namun, aksi pematokan dan pengukuran tanah untuk Tol Cinere-Serpong ternyata sudah dilakukan sejak tahun lalu yang telah memancing keresahan warga calon korban pengusuran. Misalnya, warga tiga perumahan di Serua, Ciputat, yaitu Perumahan Pertanian, Andora, dan Al Azhar.

Catur Sudarman sebagai ketua Tim Penolak Pembangunan Jalan Tol mewakili 130 KK di tiga perumahan itu menceritakan, setahun lalu warga mengemuka ada orang melakukan pematokan dan pengukuran tanah tanpa seizin warga. Orang itu sudah mendapat izin dari lurah Serua. Ketika warga bertanya ke lurah, barulah mereka tahu bahwa permukiman mereka bakal dilintasi jalan Tol Cinere-Serpong.

Ketika itu, warga protes dan mengajak pemerintah untuk bermediasi. Akan tetapi, belum ada kesempatan untuk bertemu. Catur bersama warga tiga perumahan juga berkali-kali melayangkan surat ke Kementerian PU, gubernur Banten, dan wali kota Tangerang Selatan untuk menanyakan kejelasan nasib rumah mereka. "Tapi, belum digubris. Pemerintah seakan tidak mau diajak dialog," ujar Catur yang tinggal di Perumahan Pertanian, Jalan Bukit Raya, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.

Warga juga sudah pernah menemui DPRD Tangerang Selatan untuk meminta kejelasan mengenai kelanjutan pembangunan jalan tol. Namun, DPRD belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Warga hanya diberi janji bahwa mereka akan diberi penjelasan jika ada informasi terbaru. Nyatanya sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. "Kita buat saja spanduk penolakan pembuatan jalan tol, kita pajang di tengah jalan," kata Catur.

Catur mengharapkan, pemerintah merevisi ulang proyek jalan tol itu karena warga mendapatkan tanah tidak gampang. Mereka sudah nyaman pula tinggal di situ. "Sekali-kali pemerintah yang mengerti kita, jangan warga terus yang mengerti pemerintah," kata Catur. Sekalipun begitu, jika digusur paksa, warga akan mengikuti keinginan pemerintah untuk menunjukkan bagaimana menjadi warga yang baik. "Tapi, kita kecewa dengan pemerintah."

■ c91 ed: rahmad budi harto